



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM

Kantor Gubernur Jalan Soa Siu Dok 2 Jayapura - Papua, email : birohukum@papua.go.id, laman: <https://papua.go.id/>

DAFTAR


DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PRODUK HUKUM DAERAH

Tahapan perumusan sebuah produk hukum daerah tentu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dan Permendagri Nomor 180 Tahun 2015 dan perubahannya Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang di uraikan dalam table berikut :

No	Tahapan Pembentukan Perda dan Pergub Provinsi Papua	Ket
1	<p>a. Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan propemperda2. Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka dan3. Perencanaan penyusunan rancangan perda di luar propemperda <p>b. Perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan di sesuaikan dengan kebutuhan Lembaga, komisi dan instansi masing - masing</p>	
2	<p>a. Penyusunan Propemperda dilingkungan pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dalam hal ini Biro Hukum Setda Provinsi Papua sedangkan penyusunan propemperda provinsi di lingkungan DPRD provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda</p> <p>b. Penyusunan Raperda Provinsi disertakan kajian naskah akademik dan/ atau keterangan yang merupakan penjelasan umum tentang raperda yang di inisiasi oleh SKPD pemrakarsa dan Bapemperda untuk raperda inisiatif DPRD</p>	
3	<p>Rapat Pembahasan Raperda dan Rapergub, untuk penyelarasan Raperda dan Rapergub yang di koordinir oleh Biro Hukum, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rapat internal tim Biro Hukumb. Rapat dengan SKPD pemrakarsa dan	

	c. Rapat harmonisasi dengan instansi vertikal d. Rapat ditingkat pejabat eksekutif	
4	Proses Penetapan Produk Hukum Daerah melalui paraf berjenjang	
5	Penetapan dan Pengundangan Minute Produk Hukum oleh Gubernur dan Salinan yang di tandatangani oleh Kepala Biro Hukum	
6	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	

KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700912 199712 2 001